

RANCANGAN AKHIR

PERUBAHAN
RENCANA
STRATEGIS
DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP
KABUPATEN
KULON PROGO



2017 - 2022

KULON PROGO
2019



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 ini dapat diselesaikan sesuai amanat perundangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 seiring dengan adanya pengelolaan dana keistimewaan, perbaikan indikator kinerja, dan evaluasi capaian kinerja.

Perubahan Renstra ini disamping sebagai pembuktian akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Perubahan Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renstra yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kulon Progo, 21 November 2019

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo

Arif Prastowo, SSos., MSi
Pembina Utama muda; IV/c
NIP. 19700514 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	9
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	12
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD	27
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian LHK dan DLHK DIY	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	29
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Bagan Alur Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	
- Meta Data Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022	
- Peta Indikator Kinerja	

BAB I PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan



Ekowisata Mangrove di Pasir Mendit, Jangkar, Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh berbagai instansi dan dikoordinasikan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Tujuan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampungnya. Dimana kelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Seiring dengan Visi Pembangunan Kulon Progo yang akan dicapai selama periode Renstra 2017-2022, yaitu: “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”, maka tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tergambarkan pada Misi ke-4 yaitu “Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas”.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo adalah dokumen perencanaan DLH untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan Kabupaten Kulon Progo akan berkembang secara pesat seiring dengan terlaksananya pembangunan beberapa proyek berkelanjutan, antara lain penyempurnaan Yogyakarta International Airport, jalur kereta api bandara, pembangunan Aerotropolis yang mendukung bandara baru, pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan (JJLS), jalan tol Yogya-Cilacap, dan pembangunan Jalur Bedah Menoreh. Semuanya tentu berharap proyek tersebut dapat mengungkit kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan dengan tetap memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di segala bidang akan diikuti dengan meningkatnya masalah lingkungan dan sosial.

Permasalahan lingkungan yang muncul ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia yang mengeksplotasi lingkungan melampaui daya dukung dan daya tampungnya serta tidak mengindahkan etika lingkungan. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampung.

Perubahan RENSTRA merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Renstra dan Perubahannya ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap organisasi perangkat daerah harus menyusun Rencana Strategis. RENSTRA DLH Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, Renstra Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan DIY, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya.

Penyusunan Perubahan Renstra melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya. Potensi dan permasalahan lingkungan diidentifikasi bersama para pihak yang dilakukan dengan diskusi secara terfokus (focus grup discussion), melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat, Jejaring Pengelolaan Sampah Mandiri, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan OPD terkait. Proses tersebut telah menghasilkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon progo yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan, serta indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2017 -2022 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 - 2022, peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah:

- a. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 18 Tahun 1951;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

- d. Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019;
- k. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa yogyakarta Nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025;
- l. Peraturan Gubernur DIY nomor 20 tahun 2018 tentang Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022;
- m. Peraturan Gubernur DIY nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan;

- n. Peraturan Gubernur DIY Nomor 140 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
- t. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup.
- u. Peraturan Bupati nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 adalah :

- a) Sebagai pedoman perumusan kebijakan dan penyusunan program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2017 - 2022
- b) Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan DLH Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu tahun 2017-2022.
- c) Memberikan arah dan ukuran bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan.
- d) Menjadi pedoman pengukuran kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra :

- a. Melakukan penambahan Program Urusan Keistimewaan DIY berdasarkan pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 beserta indikator program dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif
- b. Melakukan penyesuaian indikator Tujuan Daerah, Sasaran Daerah, Program Pembangunan Daerah, Sasaran Perangkat Daerah, beserta indikator dan formula perhitungannya
- c. Melakukan penyesuaian Program Perangkat Daerah beserta indikator, formula perhitungan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif berdasarkan hasil evaluasi dan perubahan kelembagaan

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup disusun sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan serta
Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH Strategis

3.5. Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII.PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- II.2. Sumberdaya OPD
 - II.2.1. Kondisi Kepegawaian
 - II.2.2. Kondisi Sarana & Prasarana
- II.3. Kinerja Pelayanan OPD
- II.4. Tantangan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan kegiatan di bidang tata lingkungan;
2. menyelenggarakan kegiatan di bidang penataan dan pengendalian; dan
3. menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan.

Mengingat perkembangan dinamika pembangunan urusan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten telah dievaluasi kelembagaan, struktur organisasi, fungsi dan tugasnya. Dengan menyesuaikan ketugasannya, maka telah dilakukan penata-ulan uraian tugas per seksi dan bidang, sehingga dilakukan perubahan tatanama seksi dan bidang.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yang terkini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :

1. Seksi Persampahan dan Pengembangan Kapasitas
2. Seksi Pengkajian dan Konservasi Lingkungan
- d. Bidang Penataan dan Pengendalian , terdiri dari :
 1. Seksi Perizinan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 2. Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Fungsi tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas pengelolaan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, ketatausahaan, kehumasan, kearsipan & perpustakaan serta administrasi kepegawaian, melaksanakan kegiatan perencanaan dan keuangan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja.

2. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi penyelenggaraan persampahan dan pengembangan kapasitas, pengkajian dan konservasi lingkungan. Tugas Bidang Tata Lingkungan adalah :

- a. Melaksanakan koordinasi pengelolaan persampahan, pengembangan kapasitas baik perorangan maupun kelompok peduli LH
- b. Melaksanakan pengkajian di bidang lingkungan hidup, konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati

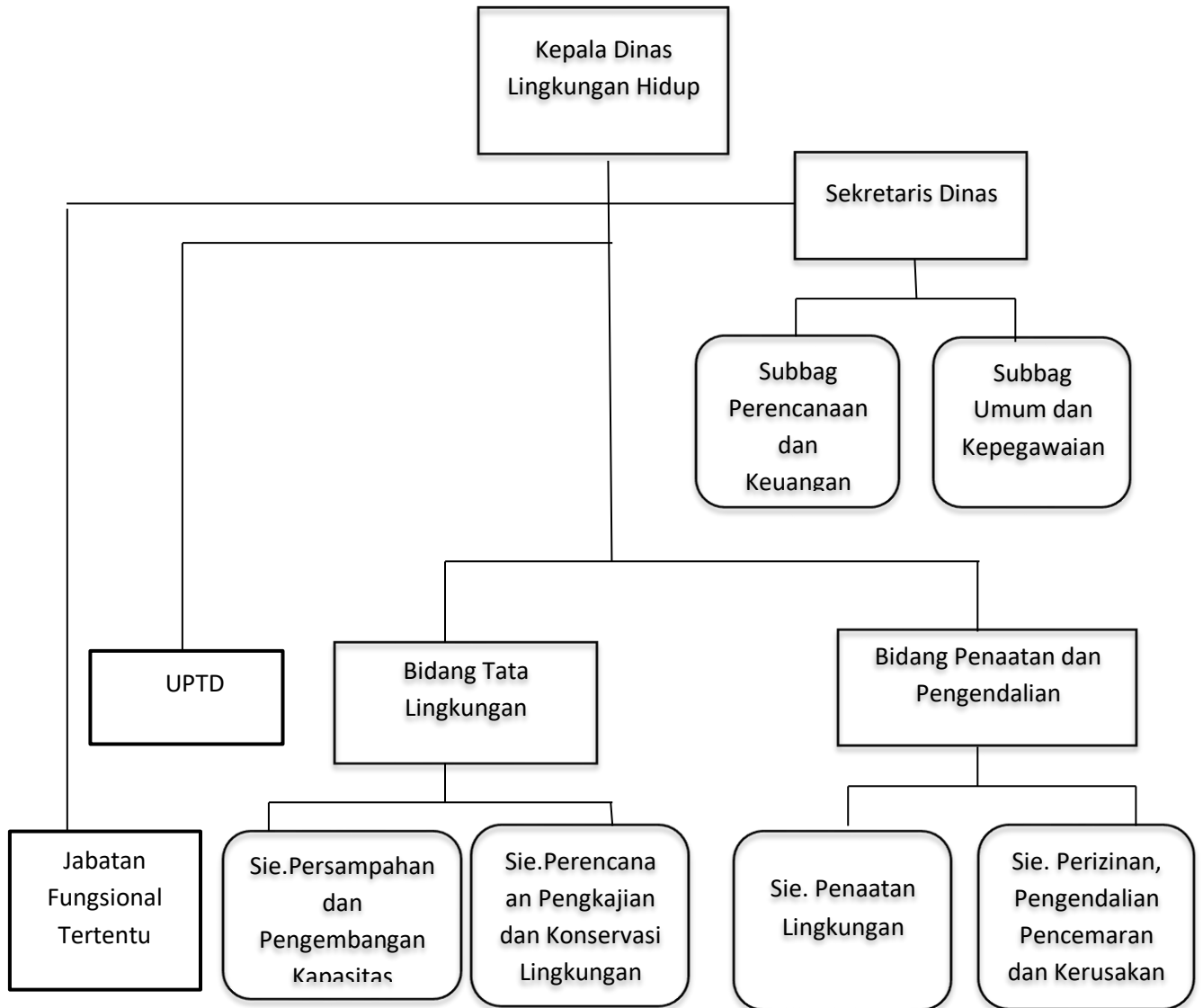
3. Bidang Penataan dan Pengendalian

Bidang Penataan dan Pengendalian mempunyai fungsi penyelenggaraan perizinan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan dan penegakan hukum. Tugas Bidang Penataan dan Pengendalian adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

- b. Melaksanakan pengawasan kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk di dalamnya pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :



Gambar 1.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

II.2. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup

II.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya DLH Kulon Progo didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 21 ASN dengan kondisi sebagai berikut (tabel 1) :

Tabel 1.

Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut jenis kelamin dan golongan ruang pada tahun 2019

Unit	Pria	Wanita	Gol.I	Gol. II	Gol.III	Gol.IV	Jumlah
Kepala	1	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	4	4	-	1	6	1	8
Bidang Tata Lingkungan	3	2	-	1	3	1	5
Bidang Penataan dan Pengendalian	4	2	-	-	5	1	6
Jabatan Fungsional Tertentu	1				1		1
Jumlah	13	8	0	2	15	4	21

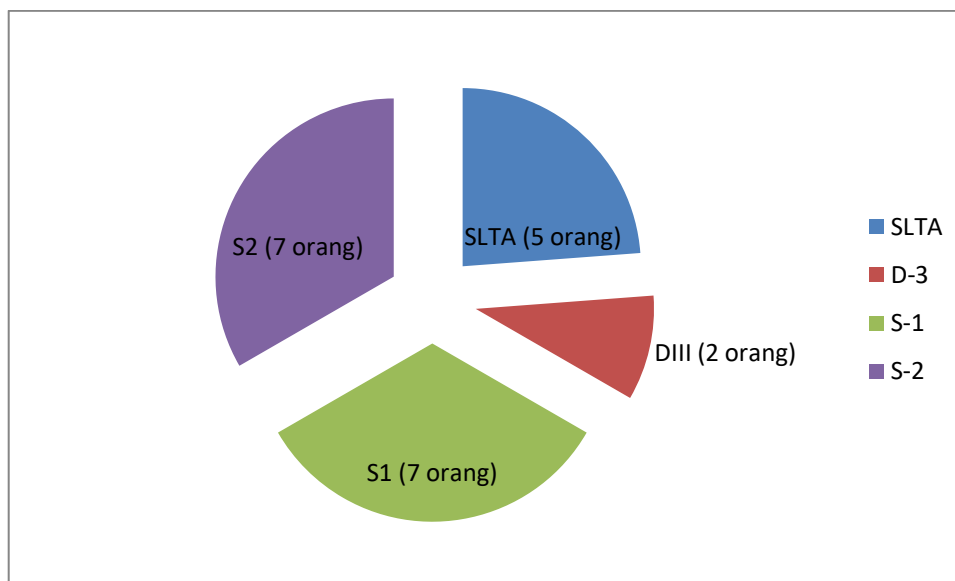
Rasio pegawai berjenis kelamin laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang atau 36 % ASN di DLH Kulon Progo adalah perempuan.

Menurut golongan dan ruangnya, prosentase terbesar (71 %) dari golongan III sebanyak 15 orang, disusul golongan IV sebanyak 4 orang (19 %) dan golongan II sebanyak 2 orang (10 %).

Tabel 2.

Tingkat pendidikan ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Unit	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	Jumlah
Kepala	-	-	-	-	1	1
Sekretariat	-	3	1	3	1	8
Bidang Tata Lingkungan	-	1	-	2	2	5
Bidang Penataan & Pengendalian	-	1	1	2	2	6
Jabatan Fungsional Tertentu	-	-	-	-	1	1
Jumlah	0	5	2	7	7	21



Gambar 2.

Diagram Tingkat Pendidikan ASN DLH Kab. Kulon Progo pada tahun 2019

Mayoritas ASN DLH Kulon Progo berpendidikan S1 atau S2 33,33 % , disusul dengan 24 % berpendidikan SLTA, dan 10 % berpendidikan D3.

Tabel 3.

Jumlah ASN DLH Kabupaten Kulon Progo menurut Jabatan Struktural tahun 2019

No.	Uraian	JFT	JFU	Eselon		
				II	III	IV
1	Kepala	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	5	-	1	2
3	Bidang Tata Lingkungan	-	2	-	1	2
4	Bidang Pencaatan & Pengendalian	-	3	-	1	2
5	Jabatan Fungsional Tertentu	1	-	-	-	-
Jumlah		1	10	0	3	7

Sesuai Peraturan Berdasarkan jabatan, DLH Kulon Progo memiliki 3 pejabat eselon III, 7 pejabat eselon IV, 1 JFT dan 10 Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo nomor 22 tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi pada Pemerintah Daerah, maka kebutuhan ASN dan kondisi riil jumlah ASN DLH pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut (tabel 4) :

Tabel 4.
Jumlah kebutuhan ASN DLH Kulon Progo

No.	Uraian	Jumlah Kebutuhan	Kondisi eksisting	Kekurangan
1	Jabatan struktural	10	10	0
2	Jabatan Fungsional Tertentu	5	1	4
3	Jabatan Fungsional Umum	24	10	14
	Jumlah	39	21	18

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa total kebutuhan ASN di DLH Kulon Progo sebanyak 39 orang, namun kondisi riil jabatan yang sudah terpenuhi baru 21 orang, sehingga masih ada kekurangan 18 ASN di DLH Kulon Progo terdiri dari 4 JFT dan 14 JFU.

II.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarpras di DLH Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Kondisi Aset DLH Kulon Progo Tahun 2019

No.	Jenis Aset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
1	Gedung 1 lantai	1	1	-	-
2	Kendaraan Dinas roda 4	5	3	2	Rusak ringan
3	Kendaraan Dinas roda 2	10	9	1	Rusak ringan
4	Kendaraan Dinas roda 3	1	1	-	-
5	Wireless	1	1	-	-
6	Mesin Ketik	1	0	1	Rusak ringan
7	Laptop	14	14	0	-
8	Komputer	13	11	2	Rusak sedang
9	Printer	11	11	-	-
10	Proyektor LCD	3	2	1	Rusak sedang
11	Ruang Rapat	2	2	-	-
12	AC	9	9	-	-
13	TV	1	1	-	-
14	Kamera	1	1	-	-
15	Sound system	1	1	-	-
16	Telepon dan fax	2	1	-	-
17	UPS	0	0	-	-
18	Alat-alat laboratorium :				
	Aerator	1	1	-	-
	Alat Destilasi	1	1	-	-
	BOD Measurement	1	1	-	Botol BOD tidak ada
	Centrifuge	1	1	-	-
	Conductivity meter	1	1	-	-
	Current meter	1	1	-	Tidak nyala

No.	Jenis Asset	Jumlah (unit)	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Rusak (unit)	Keterangan tentang yang rusak
	Desikator	1	1	-	-
	DO meter	1	1	-	-
	Dregde	1	1	-	-
	Furnace	1	1	-	-
	G P S	1	1	-	-
	Hot Plate	1	1	-	-
	Ice Box	1	1	-	-
	Kyendhal	1	1	-	-
	Lemari asam	1	1	-	-
	Magnetic stirer	1	1	-	-
	Niskin	1	-	1	Selang putus
	Oven	1	1	-	-
	Perangkat titrasi/buret	1	1	-	-
	PH meter	2	1	-	-
	Refrigerator/ pendingin	1	1	-	-
	Salinometer	2	2	-	-
	Sound level meter	1	1	-	-
	Spectrofotometer	2	1	1	Lampu UV mati
	Stop watch	1	1	-	-
	Theodolit Tripod	1	1	-	charger tidak ada
	Waterbath	1	1	-	-
	Genset	1	1	-	-
	Autoklaf	1	1	-	-
	Inkubator	1	1	-	-
	HVAS	1	1	-	-
	Timbangan Analitik	1	1	-	-
	Turbidity meter	1	1	-	-
	Water sampler V & H	1	0	1	-
	CO Meter	1	1	-	-
	DO meter	1	1	--	-
	Gas sampler udara	1	1	-	-
	Anemometer	1	1	-	-
	Merkuri Analyzer	1	1	-	-
19	Aset lainnya	751	751	0	-
	JUMLAH	866	856	10	-

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar aset tetap di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, baik berupa gedung bangunan, alat-alat mesin dan perkantoran serta aset lainnya (pohon perindang jalan) sebagian besar dalam kondisi baik (98,84 %).

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pencapaian kinerja pelayanan DLH selama 5 tahun periode Renstra sebelumnya, dapat dilihat pada tabel 6.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 4 jenis pelayanan, yakni :

- (1) Pelayanan pencegahan pencemaran air, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air
- (2) Pelayanan pencegahan pencemaran udara, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara
- (3) Pelayanan informasi status kerusakan lahan akibat produksi biomassa, dengan indikator kinerja : prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.
- (4) Pelayanan penanganan kasus akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan, dengan indikator kinerja : prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.

Tabel 6. Target dan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada periode Renstra 2017 – 2022

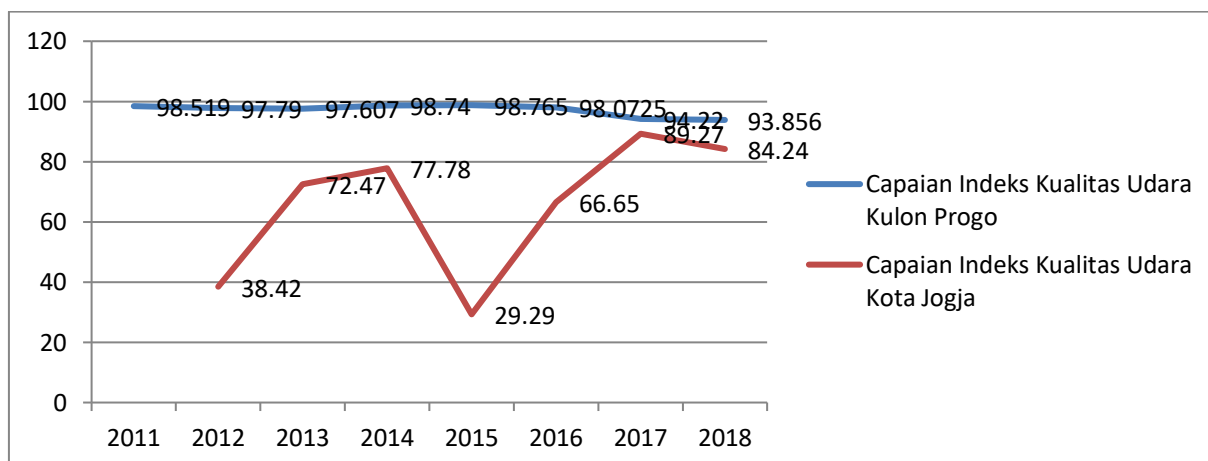
No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi tahun ke-		Rasio capaian tahun ke-	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
A.	Urusan Lingkungan Hidup														
	Standar Pelayanan Minimal														
1	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi pencegahan pencemaran air	%	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
2	Prosentase jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran udara	%	100	-	-	80	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
3	Prosentase luasan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakannya	%	100	-	-	80	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
4	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan LH yang ditindaklanjuti	%	100	-	-	80	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)														
1	Penegakan Hukum lingkungan	%	-	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
2	Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	100,0
	Indikator Kinerja Utama OPD														
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	-	-	88,41	93,86	94,28	95,24	95,45	95,65	94,22	93,86	100,0	100,0
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	-	-	-	34,13	38	38	38	38	38	40	38	100,0	100,0

Dari tabel 6, dapat terlihat semua indikator SPM sudah tercapai 100% dari target tiap tahunnya.

Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu : (1) Penegakan hukum lingkungan, dan (2) Cakupan Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal. Penegakan hukum lingkungan sudah tercapai 100 % melalui kegiatan Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan. Sedangkan cakupan Pengawasan AMDAL dilakukan terhadap usaha yang berskala AMDAL. Namun di Kulon Progo beberapa usaha berskala AMDAL sudah tidak beroperasi lagi. Pengawasan dan pembinaan dilaksanakan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, baik yang berskala UKL-UPL maupun AMDAL.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu (1) Indeks Kualitas Udara, dan (2) Indeks Kualitas Air.

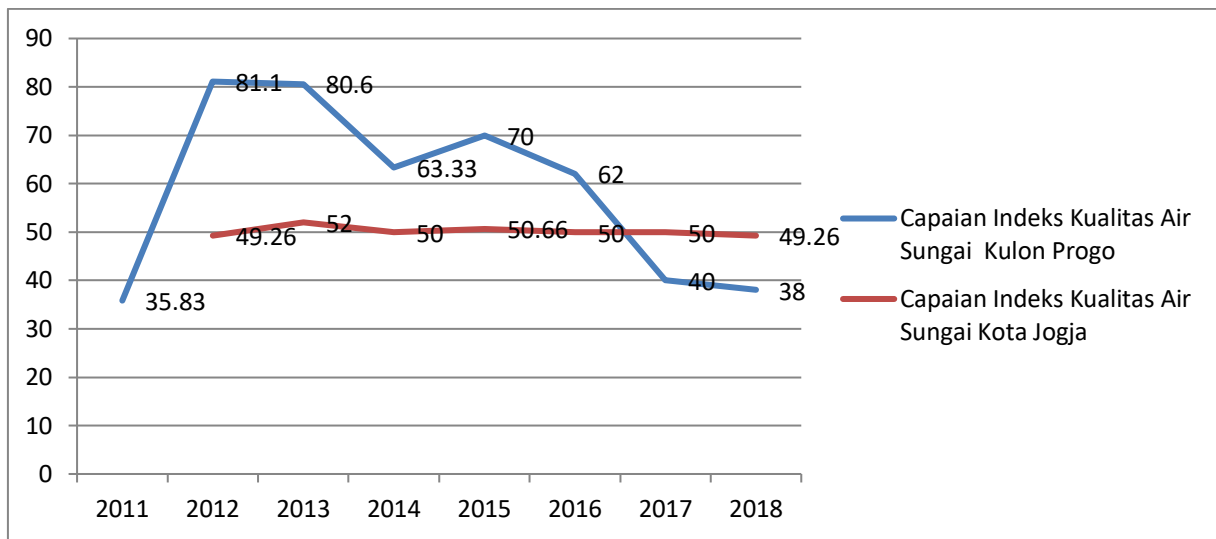
Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja Indeks Kualitas Udara pada periode tahun 2017 – 2019 selalu mencapai target, meskipun kualitas udara cenderung menurun. Faktor yang mendorong tercapainya target ini ini karena berkorelasi dengan penambahan luasan tutupan vegetasi yang selalu meningkat dari tahun ke tahun, meskipun terdapat ancaman perubahan alih fungsi lahan hijau.



Gambar 3. Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan kota Yogyakarta dari tahun 2011 s/d 2018

Sedangkan Indeks Kualitas Air sungai belum dapat mencapai target. Oleh karena mengingat beban pencemaran lingkungan cenderung untuk meningkat, maka

perlu upaya yang lebih keras dalam pengendalian pencemaran air, yang menjadi salah satu fokus pencapaian pada periode Renstra ini.



Gambar 4. Capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 s/d 2018

Anggaran, pendapatan dan realisasi belanja untuk pelayanan DLH Kulon Progo dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan data tabel 7, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Tidak Langsung (gaji dan tunjangan) naik 7,82 % untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 5,32 %, sedangkan untuk Belanja Langsung naik rata-rata 63,73 % setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 61,37 %. Peningkatan yang cukup besar dalam Belanja Langsung adalah pada belanja modal. Hal tersebut menunjukkan adanya komitmen dari PemKab Kulon Progo untuk meningkatkan kualitas & kuantitas sarana prasarana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan maupun untuk peningkatan pengelolaan dan konservasi LH.

Penyerapan anggaran belanja tidak langsung setiap tahunnya selalu lebih besar dari 97%. Penyerapan anggaran belanja langsung secara berturut-turut mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja keuangan Dinas LH.

Anggaran dan realisasi pendanaan per program pada Dinas Lingkungan Hidup pada periode 2017-2022 disajikan pada tabel 8. Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa rasio antara anggaran dan realisasi per program berkisar antara 0,97 – 0,99. Capaian realisasi anggaran tersebut disebabkan karena adanya efisiensi anggaran yakni terdapatnya sisa anggaran pengadaan dari komponen pihak ke-3, serta penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga riil di pasaran.

Tabel 7. Anggaran dan Realisasi Belanja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada tahun (Rp dalam juta)			Realiasi anggaran pada tahun (Rp. dalam juta)		Rasio antara anggaran dan realisasi pada tahun			Rata-rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2017	2018	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	44,96	0,00	0,00	44,96	0,00	1,00	0,00			-100,00
Hasil Retribusi Daerah	44,96	0,00	0,00	44,96	0,00	1,00	0,00			-100,00
Belanja Tidak Langsung	1.441,99	1.554,78	1.464,62	1.426,30	1.502,22	0,99	0,97		7,82	5,32
Belanja Pegawai	1.441,99	1.554,78	1.464,62	1.426,30	1.502,22	0,99	0,97		7,82	5,32
Belanja Langsung	2.110,47	3.455,48	2.353,70	2.069,03	3.338,74	0,98	0,97		63,73	61,37
Belanja Pegawai						0,00	0,00			
Belanja Barang & Jasa	1.304,21	2.476,20	1.299,41	1.276,11	2.364,92	0,98	0,96		89,86	85,32
Belanja Modal	806,26	979,28	1.054,29	792,92	973,82	0,98	0,99		21,46	22,81

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Anggaran pada tahun ke- (Rp. Juta)			Realisasi Anggaran pada tahun ke- (Rp.Juta)			Rasio antara anggaran & realisasi pada tahun ke			Rerata pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup	744.59	823.71	518.53	728.29	801.26	0.00	0.98	0.97	0.00	63.00	59.00
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	223.54	356.37	184.10	217.95	349.16		0.97	0.98			
Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup	414.15	308.49	228.08	408.90	299.06		0.99	0.97			
Penyusunan data dan informasi Lingkungan Hidup	106.90	158.86	95.80	101.43	153.04		0.95	0.96			
Program Penataan & Pengendalian Pencemaran	1122.19	1894.40	1304.84	1112.22	1865.12	0.00	0.99	0.98	0.00	59.00	64.00
Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	506.18	1384.96	394.81	504.34	1374.81		1.00	0.99			
Pengawasan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup	63.75	59.77	28.81	63.49	59.36		1.00	0.99			
Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	33.50	28.13	10.53	33.03	27.33		0.99	0.97			
Pengkajian lingkungan	137.19	70.00	33.89	135.77	69.79		0.99	1.00			
Pemantauan dan pemulihan kualitas	381.57	351.54	848.43	375.59	333.84		0.98	0.95			
JUMLAH	1866.78	2718.11	1823.37	1840.51	2666.38						

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo dalam beberapa tahun mendatang antara lain :

Tantangan :

- Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- Menurunkan pencemaran dari saluran drainase yang masuk ke badan air.
- Perlu adanya sertifikasi pemanfaatan air tanah
- Penyerapan air di wilayah atas penting dilakukan, penanaman pohon gayam di sekitar Waduk Sermo
- Kapasitas TPA Banyuroto yang hampir melebihi kapasitas sehingga perlu dipikirkan kebijaksanaan agar dapat mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA . Area landfill sudah datar dan mulai menggunung. Agar dipikirkan fasilitas pengolahan popok bayi dan manula
- Pentingnya kader lingkungan di tingkat kecamatan sebagai perpanjangan tangan DLH & pegiat lingkungan. Banyak desa yang tidak menganggarkan kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan lingkungan.
- Penghargaan tempat wisata yang memperhatikan lingkungan (indikatornya semacam proklamasi).
- Pengelolaan sampah di desa masih memprihatinkan, banyaknya sampah plastik sehingga perlu didukung dengan regulasi yang bisa diterapkan di desa/pedukuhan.
- Pendampingan rutin bagi masyarakat diperlukan untuk pengelolaan sampah. (dibentuk semacam FASKEL seperti di kota Jogja yang anggarannya tidak terlalu besar).
- Agar diberikan insentif bagi masyarakat yang memelihara pohon perindang di tepi jalan

Peluang :

- Kerjasama antara DLH dan Dikpora, misalnya penggunaan dana BOS untuk pengelolaan lingkungan sekolah maupun untuk pendidikan karakter.
- Laboratorium lingkungan DLH dapat menghasilkan PAD, perlu pengembangan laboratorium dan akreditasi laboratorium.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Fungsi perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan oleh masing-masing seksi, yang dikoordinir oleh Bidang-Bidang, dan difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dengan arahan dari Kepala DLH dan Pimpinan Daerah.

Fungsi perumusan sistem perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan dokumen Renstra, Renja DLH dan kajian-kajian lingkungan.

Fungsi penataan dan pengendalian di bidang pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui koordinasi, fasilitasi & pemantauan kualitas lingkungan melalui analisis laboratorium, pemulihan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Juga melalui pengkajian dokumen lingkungan yang diajukan oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan, serta penataan dan penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundang-undangan di bidang LH.

Fungsi tata lingkungan dilaksanakan melalui pengkajian & konservasi lingkungan, penyusunan data & informasi lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat peduli lingkungan, pengembangan kapasitas dan koordinasi pengelolaan persampahan. Dalam melaksanakan tugas & fungsinya, DLH Kulon Progo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagaimana diuraikan pada Tabel 9.

Tabel 9.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL(Diluar KewenanganOPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	Pelayanan permohonan rekomendasi dokumen lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UURI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ PP 27 Tahun 2012 ▪ Permen LH nomor 16 tahun 2012 ▪ Permen LH nomor 17 tahun 2012 ▪ Permen LH nomor 8 tahun 2013 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan agenda pemeriksaan dokumen ▪ Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan info/dokumen lingkungan yang diajukan • Kecepatan pemohon dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen 	Data usaha / kegiatan dari pemohon tidak konsisten
Gambaran pelayanan SKPD	Pelayanan permohonan Izin Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU RI Nomor 32 tahun 2009 ▪ PP no 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecepatan verifikasi dokumen dan tidak seimbang jumlah personel dengan jumlah izin yang masuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dokumen izin yang diajukan • Kecepatan pemohon dalam melengkapi dan memperbaiki dokumen 	Kurangnya jumlah personel yang menangani perizinan lingkungan
	Pelayanan pencegahan pencemaran air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ UURI Nomor 32 Tahun 2009 ▪ PP 82 tahun 2001 ▪ Permen LH Nomor 12 Tahun 2006 ▪ Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 ▪ Pergub DIY Nomor 7 tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alat-alat lab memerlukan kalibrasi secara periodik ▪ Keterbatasan personel laboratorium ▪ Laboratorium Lingkungan DLH belum terakreditasi, sehingga belum dapat mengeluarkan sertifikat hasil uji 	<ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan informasi dari masyarakat terhadap adanya pen-cemaran air • Kurangnya ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air • Pemrakarsa usaha ingin memeriksakan sampel di DLH, tapi lab DLH belum terakreditasi, sehingga tidak bisa melakukan uji dan mengeluarkan sertifikat hasil uji lab 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya Ketaatan usaha / kegiatan dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL(Diluar KewenanganOPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak 	<ul style="list-style-type: none"> UURI Nomor 32 Tahun 2009 PP 41 Tahun 1999 Permen LH Nomor 20 Tahun 2008 Permen LH Nomor 21 Tahun 2008 SK Gub DIY Nomor 169 tahun 2003 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan fungsi laboratorium Keterbatasan jumlah personel lab Belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Kecepatan informasi masyarakat terhadap adanya pencemaran udara Kurangnya Ketaatan persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan dalam pengelolaan sumber pencemar udara
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa 	<ul style="list-style-type: none"> UURI Nomor 32 Tahun 2009 PP 20 tahun 2000 Permen LH Nomor 20 Tahun 2000 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya JFT Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya sinkronisasi antara OPD 	<ul style="list-style-type: none"> paramater kerusakan lahan sangat banyak
	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan LH 	<ul style="list-style-type: none"> UURI Nomor 32 Tahun 2009 Permen LH nomor 20 Tahun 2008 Permen LH nomor 9 Tahun 2010 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya JFT PPLHD & PPNS 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengaduan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan pemantauan
Kajian terhadap Renstra DINAS DIY	Terjaganya kelestarian Lingkungan dan Kesesuaian Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> UU Tata Ruang No.32 Tahun 2009 Perda DIY No.2 Tahun 2010 	Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangan	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sektoral terkait izin pemanfaatan ruang 	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pengelolaan LH
Kajian terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi LH & neraca sumber daya alam (NSAD) & lingkungan hidup yg handal;	<ul style="list-style-type: none"> Permen LHK no. P.39/Menlhk-Setjen/2015 	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan OPD terhadap peraturan perundangan 	<ul style="list-style-type: none"> Informasi dan kebijakan pemerintah pusat 	Belum fix-nya perumusan IKLH di tiap daerah sehingga dapat diperbandingkan Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) antar daerah dan nasional
Kajian terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)	<ul style="list-style-type: none"> Review RTRW 	<ul style="list-style-type: none"> Perda RTRW, Perbup RTBL, masterplan 	Koordinasi dengan BKPRD tentang kesesuaian pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi BKPRD dengan instansi teknis tingkat kabupaten & DIY Belum pahamnya investor terhadap ketentuan pemanfaatan ruang di Kulon Progo 	

Sedangkan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berasal dari lingkungan eksternal disajikan pada tabel 10.

Tabel 10.

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu-isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemanasan Global	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gas Rumah Kaca ▪ Energi terbarukan ▪ Gerakan Hemat Energi Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi GRK dan Rencana Aksi Daerah tentang penurunan emisi. ▪ Pengembangan teknologi ramah lingkungan ▪ Pengendalian penggunaan pupuk kimia ▪ Gerakan 3R ▪ From Waste to energy 	
2.	Perubahan Iklim dan kerusakan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ eksploitasi SDA yang berlebihan ▪ Kebakaran hutandan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penurunan Keanekaragaman hayati ▪ Peningkatan resiko Intrusi air laut ▪ Peningkatan resiko terjadinya Longsor dan banjir ▪ Penurunan kualitas udara ▪ Meluasnya kawasan resiko kekeringan ▪ Pengembangan Adaptasi Perubahan Iklim berbasis Ekosistem 	
3.	Diterapkannya Masyarakat Ekonomi Asia (MEA)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (NYIA) ▪ Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur & sekitarnya 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan JJLS dan Jalan Tol Yogya-Cilacap ▪ Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara ▪ Pembangunan Dermaga Pelabuhan Adikarto ▪ Pembangunan Jalur Bedah Menoreh ▪ Pembangunan Aerotropolis City sebagai pendukung Bandara NYIA ▪ Pembangunan Border City dan pelabuhan di Kabupaten Purworejo (Provinsi Jawa Tengah) 	

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Visi : **Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter & berbudaya berdasarkan iman & taqwa**

Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya

Misi 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram

Misi 4 : Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo mempunyai kaitan yang erat dengan Misi Daerah ke - 4 serta selaras dengan Program Pembangunan Daerah, yakni Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut (tabel 11) :

Tabel 11.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter & berbudaya berdasarkan iman dan taqwa				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib & tenteram	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersusunnya RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH) di tingkat provinsi yang menjadi acuan RPPLH Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> RPPLH Nasional belum terpublikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Daya Dukung & Daya Tampung Lingkungan oleh Pemkab Kulon Progo pada tahun 2020
2	Misi 4 Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam & didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pengawasan dan pemantauan 	<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya aturan detail pengaturan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Telah disusunnya dokumen RTRW Kulon Progo tahun 2011-2032 dan Perubahan RTRW
	Program Peningkatan dan Pengendalian Pencemaran	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa regulasi yang sulit diimplementasikan 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan LH 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah adanya beberapa SOP pelayanan
	Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pengelolaan LH 		<ul style="list-style-type: none"> Adanya aturan perundangan bidang LH Adanya Komitmen pimpinan daerah terhadap pengelolaan LH

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1). Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6 pada tahun 2019. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2). Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap devisa dan PNBPN. Adapun telaahan terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia secara ringkas disajikan pada tabel 12 :

Tabel 12.

Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Renstra Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI Tahun 2015-2019 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Telaahan atas Renstra Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal.	<ul style="list-style-type: none"> • Baru sedikit Sumber Daya Manusia di DLH Kulon Progo yang mengerti aplikasi sistem data informasi lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan jumlah personel laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan daerah untuk mendorong SDM agar menguasai teknologi informasi • Ketersediaan anggaran pengadaan dan pemeliharaan alat laboratorium dan bahan kimia
2	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI) dan jasa lingkungan secara berkelanjutan sebagai sumber bahan baku untuk sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, energi alternatif, dan ekowisata.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sedikitnya pegiat lingkungan yang terdata 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jumlah personel konservasi lingkungan • Kurangnya koordinasi lintas sektor • Keterbatasan anggaran dan SDM untuk pembinaan kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyuluhan masyarakat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 – 2032. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tabel 13.

Permasalahan Pelayanan OPD DLH Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ul style="list-style-type: none"> mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaankawasan lindung meningkatkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan 	<p>Usulan kegiatan OPD melalui DAK, Dana Keistimewaan dan lainnya</p> <p>Adanya kelompok pengelola sampah mandiri maupun bank sampah yang sudah berdiri namun tidak menunjukkan aktifitas kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya SDM perencana di DLH dikarenakan pengusulan kepada pemerintah banyak menggunakan sistem informasi dimana batas waktu entrinya segera Kurangnya bantuan sarana prasarana pengelolaan persampahan 	<p>Sinergi program dan kegiatan DLH KP dengan P3EJ, DLHK DIY dan Kementerian LHK</p> <p>Komitmen pimpinan daerah untuk memajukan kelompok maupun bank sampah.</p>
2	melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;	Belum ada database keaneka ragaman hayati Kulon Progo	Alih fungsi lahan hijau	Komitmen pemerintah kabupaten untuk melestarikan keanekaragaman hayati dengan strategi pemanfaatan sebagai sumber obat, pangan dan energi, pemanfaatan potensi ekonomi dan wisata
3	Pengembangan RTH di kawasan sempadan	Tugas dan fungsi pengembangan RTH ada pada UPTD Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPKP Kulon Progo	Keterbatasan lahan milik Pemkab dan keuangan daerah	Sinergi dan koordinasi antar OPD yang solid untuk memenuhi kebutuhan RTH sesuai yang diatur dalam perundangan yaitu 20 % RTH Publik dan 10 % RTH privat

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan

berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Adapun permasalahan pelayanan OPD yang dihadapi berdasarkan analisis KLHS disajikan dalam tabel 14 :

Tabel 14.
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memasukkan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam perubahan RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Kulon Progo	-Belum adanya acuan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), baik di tingkat nasional dan provinsi dimana RPPLH harus sinkron dengan kajian Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Belum ada kepastian disahkannya RPPLH Nasional maupun DIY	- Sinergi program dan kegiatan serta koordinasi dengan DLHK DIY dan Pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa (P3EJ) terkait penyusunan Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan Daerah - penyusunan Daya Dukung-Daya Tampung Lingkungan oleh Pemerintah Daerah DIY pada tahun 2020

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategi

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis DLH Kulon Progo diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi DLH di masa lima tahun mendatang. Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan, maka permasalahan yang dihadapi DLH Kulon Progo, yaitu:

1. Menurunnya kualitas air
2. Bertambahnya volume timbulan sampah

3. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan & konservasi LH
4. Masih kurang optimalnya fungsi pembinaan instansi / sektor terkait terhadap usaha kegiatan yang menjadi kewenangannya (peternakan, pertambangan dan perindustrian), sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap LH.

sehingga dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu Belum optimalnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung Visi Daerah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa” dan Misi Daerah yang ke-4 yakni “Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas” dan Misi Daerah yang ke-3 yakni “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram”, maka perlu dijabarkan lebih lanjut tujuan dan sasaran OPD.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung visi dan misi daerah adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup”.

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo adalah “Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan”.

Secara ringkas tujuan dan sasaran OPD dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran daerah tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD, yakni Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air sebagaimana digambarkan dalam tabel 15 :

Tabel 15.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo sebelum dan sesudah perubahan Renstra

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	Tahun transisi 2017		2018		2019	2020	2021	2022
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Sebelum Perubahan												
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,9	66,38	63,04	67,61	63,31	63,58	63,84	64,11
Sesudah Perubahan												
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *)	Indeks					67,74	68,02	68,06	68,12
Sebelum Perubahan												
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,41	94,22	91,3	93,86	88,82	89,09	89,35	89,62
			Indeks Kualitas Air	Indeks	34,13	40	43	38	34,54	34,81	35,07	35,34
Sesudah Perubahan												
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara	Indeks					94,28	95,24	95,45	95,65
			Indeks Kualitas Air	Indeks					38	38	38	38

Catatan : *) IKLH merupakan Indikator Kinerja Utama Daerah, sedangkan Indikator Kinerja Utama DLH Kabupaten Kulon Progo adalah Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air

Pengukuran Kinerja dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa baik kualitas udara di suatu daerah. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

nomor P.78 Tahun 2016 menyebutkan kriteria untuk pengukuran Indeks Kualitas Udara sebagai berikut :

Parameter yang diamati adalah gas hasil pembakaran bahan bakar fosil dan fasilitas industri lainnya (sulfur dioksida, SO₂), dan senyawa nitrogen dioksida (NO₂). Perhitungan dan pengolahan data dirumuskan sebagai berikut :

- Menghitung rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter SO₂ dan NO₂
- Membandingkan angka rerata SO₂ dan NO₂ dengan referensi EU, dalam bentuk indeks sementara
- Mentransformasikan indeks sementara ke dalam indeks kualitas udara (IK Udara), dengan rumus sebagai berikut :

$$IK \text{ Udara} = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

2. Indeks Kualitas Air

Ada 7 Parameter kualitas air yang diukur, yaitu :

- a. Zat padat tersuspensi (TSS, *Total Suspended Solid*),
- b. Oksigen terlarut (DO, *Dissolved Oxygen*),
- c. Jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk mengurai (BOD, *Biochemical Oxygen Demand*)
- d. Jumlah oksigen untuk mengoksidasi zat (COD, *Chemical Oxygen Demand*)
- e. Kandungan fosfat (*Total Phosphat*)
- f. Kandungan bakteri *Escherichia coli*
- g. Kandungan bakteri koliform (*Total Coliform*).

Nilai dari setiap parameter dinormalisasi ke dalam skala indeks pada angka 0-100 (terburuk-terbaik) dengan klasifikasi mutu air kelas II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Formula penghitungan dirumuskan sebagai berikut :

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})^2_M + (C_i / L_{ij})^2_R}{2}}$$

dimana :

- IPj = indeks pencemaran bagi peruntukan j,
- Ci = konsentrasi parameter kualitas air i,
- Lij = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,
- M = maksimum, R = rerata.

Hasil IPA selanjutnya dinarasikan dalam bentuk baku mutu dengan rumusan :

- Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika IPA berada pada rentang 0-1;
- Tercemar ringan jika IPA berada pada rentang 1 – 5;
- Tercemar sedang jika IPA berada pada rentang 5 – 10;
- Tercemar berat jika IPA >10

Transformasi nilai IPA ke dalam indeks kualitas air (IK Air) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo tahun 2017-2022 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 16.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

VISI : Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa			
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram			
MISI 4 : Mewujudkan Pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian Sumber Daya Alam secara berkelanjutan	1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan	1. Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
		2. Meningkatkan pengawasan, penataan dan pengendalian pencemaran lingkungan	2. Peningkatan pengawasan, penataan dan pengendalian pengendalian pencemaran lingkungan

Secara umum, beberapa hal yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dalam penguasaan di bidangnya
2. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
3. Meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama antara para pemangku kepentingan (stake holder) dan OPD, baik di tingkat kabupaten, Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kementerian.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan & sasaran jangka menengah daerah maka rencana program & kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra periode 2017 – 2022 diuraikan sebagai berikut :

I. Program Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
- a. Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup
- b. Penyusunan Data dan Informasi Lingkungan Hidup

II. Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran

- a. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- b. Pengawasan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c. Penanganan Kasus Lingkungan Hidup
- d. Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan

Pada Perubahan Renstra ini terdapat kegiatan yang dilebur, yaitu kegiatan Pengkajian Lingkungan, yang disatukan dengan kegiatan Penyusunan Data & Informasi LH pada Program Pengelolaan dan Konservasi LH.

Program – program pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup antara lain :

III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
- b. Penyediaan Jasa Keuangan
- c. Penyediaan Rapat – Rapat, Konsultasi dan Koordinasi

IV. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya

Manusia OPD :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- c. Pendidikan dan Pelatihan Nonformal

V. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja :

- a. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Adapun rencana pendanaan, indikator dan target kinerja kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup selama tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 diperlihatkan pada tabel 17.

Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Perubahan Renstra 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan															Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan						
							Tahun Transisi (2017)			Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM										
							2018		2019		2020		2021		2022		2022		2022											
							Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target				Rp (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya konservasi, perlindungan dan pengendalian sumber daya alam secara berkelanjutan	1	Program Pengelolaan & Konservasi LH	Cakupan pengelolaan dan konservasi LH	%	46,79	47,38	48,97	726.927	51,4	57,19	797.739	55,02	507.979	58,24	744.840	59,43	535.100	60,63	644.650	60,63	3.957.235	DLH		sebelum perubahan					
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	orang		160	160	217.964	160	160	346.593	160	184.099	160	250.250	160	179.750,00	160	283.650	800	1.462.306								
				Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi	kali		4	4		4	4		4		4		3		3		3		21							
				Keikutsertaan pameran	kali		3	3		3	3		3		1		1		1		1		12						sebelum perubahan	
				Fasilitasi kelompok peduli LH (Saka kalpataru, Bank Sampah,	paket		1	1		1	1		1		1		1		1		1		6							
				Kualitas even lingkungan hidup	even		8	8		7	7		7		5		5		5		5		37							
				Pengecatan pohon perindang di tepi jalan	paket		1	1		1	1		1		0		0		0		0		3							
						Peningkatan konservasi lingkungan hidup	Pohon perindang jalan	batang		200	200	407.698	150	150	298.993	150	228.076	150	372.200	150	267.390	150	231.000	950	1.805.357	DLH	Kulon Progo	sebelum perubahan		
							Sumur resapan	unit		30	30		20	20		20		20		20		20		130						sebelum perubahan
							Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air	batang		1000	1000		1000	1000		1000		1089		1000		1000		6089						sebelum perubahan
		3	Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen Profil Kehati	dokumen		1	1	101.265	1	0	152.153	0	95.804	0	122.390	0	87.960	0	130.000	1	689.572	DLH	Kulon Progo	sebelum perubahan					
	Dokumen IKLH			dokumen		1	1		1	1		1		1		1		1		1		6					sebelum perubahan			
	Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah			paket		1	1		0	0		0		0		0		0		0		1						sebelum perubahan		
	Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah			dokumen		1	1		1	1		1		1		1		1		1		6						sebelum perubahan		
	Dokumen Neraca Sumber Daya Alam			dokumen		0	0		1	1		0		0		0		0		0		1						sebelum perubahan		
	Profil Bank sampah Kulon progo			dokumen		0	0		0	0		0		1		0		0		0		1						sebelum perubahan		
	Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan			dokumen		0	0		0	0		0		0		1		0		0		1						sebelum perubahan		
	Kajian timbulan sampah harian pemukiman dan non pemukiman Kulon Progo			dokumen		2	2		0	0		0		0		0		0		0		2						sebelum perubahan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Tahun Transisi (2017)			Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan		
							Target	Realisasi	Rp (000)	2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
										Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
			Program Pengelolaan & Konservasi LH	Cakupan pengelolaan dan konservasi LH		46,79	47,38	48,97	726.927	51,4	57,19	797.739	55,34	507.979	58,82	976,46	60,03	551.180	61,25	577.430	61,25	3.162.231	DLH		Sesudah perubahan	
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	orang		160	160	217.964	160	160	346.593	160	184.099	160	277.635	160	133.180	160	148.430	800	1.307.901		Kulon Progo	Sesudah perubahan	
				Keikutsertaan dalam peringatan hari lingkungan hidup tingkat provinsi	kali		4	4		4	4		4		3		3		3		21					
				Keikutsertaan pameran	kali		3	3		3	3		3		1		1		1		12					
				Fasilitasi kelompok peduli LH (Saka kalpataru, Bank Sampah, JPSM)	paket		1	1		1	1		1		1		1		1		6					
				Kualitas even lingkungan hidup	even		8	8		7	7		7		5		5		5		37					
				Pengecatan pohon perindang di tepi jalan	paket		1	1		1	1		1		0		0		0		3					
				Kader lingkungan di kecamatan	orang		0	0		0	0		0		0		12		12		24			Baru		
				Tas belanja organik	paket		0	0		0	0		0		0		1		1		2			Baru		
				Fasilitasi sarana prasarana persampahan	unit		0	0		0	0		0		7		42		42		91				Sesudah perubahan	
		2	Peningkatan konservasi lingkungan hidup	Pohon perindang jalan	batang		200	200	407.698	150	150	298.993	150	228.076	150	236.798	150	98.000	150	99.000	950	1.368.565	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
				Sumur resapan	unit		30	30		20	20		20		20		20		20		130					
				Tanaman di daerah tangkapan, sekitar mata air	batang		1000	1000		1000	1000		1000		1089		1000		1000		6089					
		3	Penyusunan data dan informasi lingkungan hidup	Dokumen Profil Kehati	dokumen		1	1	101.265	1	0	152.153	0	95.804	0	462.026	0	320.000	0	330.000	1	1.461.248	DLH	Kulon Progo	Tetap (Penyesuaian target)	
				Dokumen IKLH	dokumen		1	1		1	1		1		1		1		1		6					
				Pembuatan film dokumenter pengelolaan sampah	paket		1	1		0	0		0		0		0		0		1					
				Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah	dokumen		1	1		1	1		1		1		1		1		6					
				Dokumen Neraca Sumber Daya Alam	dokumen		0	0		1	1		0		0		0		0		1					
				Profil Bank sampah Kulon progo	dokumen		0	0		0	0		1		0		0		0		1					
				Profil Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan	dokumen		0	0		0	0		0		1		0		0		1					
				Kajian timbulan sampah harian pemukiman dan non permukiman Kulon Progo	dokumen		2	2		0	0		0		0		0		0		2					
				Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	dokumen		0	0		0	0		0		1		0		0		1				sesudah perubahan	
				Evaluasi JAKSTRADA 1	dokumen		0	0		0	0		0		1		1		1		3				Baru	
				Evaluasi JAKSTRADA 2	dokumen		0	0		0	0		0		1		1		1		3				Baru	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Tahun Transisi (2017)			Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan		
							Target	Realisasi	Rp (000)	2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
										Target	Realisasi	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		27	Program Penataan dan Pengendalian Pencemaran	Cakupan peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran	%	58,93	63,82	63,61	1.111.200	63,92	64,63	1.863.360	63,99	1.316.467	64,04	964,99	64,09	773,16	64,66	931,46	64,66	4.293.697	DLH		Sebelum perubahan	
		1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pembangunan Taman Merokok	unit		2	2	506.670	2	2	1.374.814	2	394.809							6	2.276.293		Kulon Progo	Sebelum perubahan	
				Biodigester Biogas Limbah Ternak	unit		9	9		4	14		8			0		0		0	21				Sebelum perubahan	
				Biodigester Biogas Limbah Tahu/Tempe	Unit		0	0		1	5		2								3				Sebelum perubahan	
				Fasilitasi sarana prasarana persampahan	unit		182	182		89	89		115								386					
		2	Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH	Jumlah usaha / kegiatan yang dilakukan pengawasan	unit usaha		50	50	63.750	40	40	59.359	70	28.813							160	151.922		Kulon Progo	Sebelum perubahan	
		3	Penanganan Kasus LH	Kasus lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	kasus		10	7	30.000	10	11	27.332	10	10.526							28	67.858		Kulon Progo	Sebelum perubahan	
		4	Pengkajian Lingkungan	Kajian timbul sampah harian pemukiman dan non permukiman Kulon Progo	dokumen		2	2	137.190	0,000	0	69.786	0	33.888							2	240.864		Kulon Progo	Sebelum perubahan (setelah perubahan Renstra digabung dengan kegiatan penyusunan data & informasi LH)	
				Dokumen Lingkungan	dokumen		250	212		250	188		250								650				Sebelum perubahan	
				Penyiapan pembentukan Komisi Penilai Amdal	paket								1					0			1				Baru	
		5	Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Pantauan Kualitas LH (Air Sungai)	sungai, titik, kali		6	6	373.590	20	20	333.837	20	848.431							46	1.555.858		Kulon Progo	Sebelum perubahan	
				Pantauan Kualitas LH (Emisi Industri)	titik. kali		4	4		5	5		5								14				Sebelum perubahan	
				Pantauan Kualitas LH (Udara Ambien)	titik, kali		10	10		10	10		10								30				Sebelum perubahan	
				Pantauan Kualitas LH (Kualitas Tanah)	titik, kali		10	10		15	15		15								40				Sebelum perubahan	
				Pantauan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sebagai	lokasi		40	40		40	40		40								120				Sebelum perubahan	
				Pengadaan Alat Laboratorium	jenis		5	5		15	15		5								25				Sebelum perubahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Tahun Transisi (2017)			Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan		
							Target	Realisasi	Rp (000)	2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
										Target	Realisasi	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		27	Program Pnaatan & Pengendalian Pencemaran	Cakupan peningkatan pnaatan dan pengendalian pencemaran	%	58,93	n.a	73,13	1.111,20	n.a	88,74	1.863,36	88,91	1.316,47	89,57	467.383	90,24	702.350	90,91	735.790	90,91	1.909.814	1.909.814,03		Sesudah perubahan	
		1	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pembangunan Taman Merokok	unit										0	166.197	0	249.749	0	261.640	0	677.586	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
				Biodigester Biogas Limbah Ternak	unit										2		2		2		6			Sesudah perubahan		
				Biodigester Biogas Limbah Tahu/Tempe	Unit										1		0		0		1			Sesudah perubahan		
				Dokumen lingkungan	dokumen										188		188		188		564			Sesudah perubahan		
				Perizinan	tahun										1		1		1		3			Tetap		
				Komisi Amdal	tahun										0		1		1		2			Baru		
		2	Pengawasan Kebijakan Pengelolaan LH	Jumlah usaha / kegiatan yang dilakukan pengawasan	unit usaha										50	50.000	50	75.136	50	78.713	150	203.849	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
		3	Penanganan Kasus LH	Persentase aduan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	%										100%	10.096	100%	15.172	100%	15.894	100%	41.162	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
		4	Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan	Pantauan Kualitas LH (Air Sungai)	sungai, titik, kali										18	241.090	18	362.293	18	379.542	54	982.925	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
				Pantauan Kualitas LH (Emisi Industri)	titik. kali										10		10		10		30			Sesudah perubahan		
				Pantauan Kualitas LH (Udara Ambien)	titik, kali										10		10		10		30			Sesudah perubahan		
				Pantauan kualitas LH (passive sampler)	titik. Kali										4		4		4		12			Sesudah perubahan		
				Pantauan Kualitas LH (Kualitas Tanah)	titik, kali										18		18		18		54			Sesudah perubahan		
				Pantauan kualitas LH (Limbah)	lokasi										40		40		40		120			Sesudah perubahan		
				Pengadaan Alat Laboratorium, Bahan kimia & pemeliharaan	jenis										5		12		10		27			Sesudah perubahan		
				Pengadaan alat uji merkuri (DAK)	paket																			Sesudah perubahan		
				Akreditasi Lab Lingkungan	paket										0		1		0		1			Sesudah perubahan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Tahun Transisi (2017)			Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan		
							Target	Realisasi	Rp (000)	2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (000)				Target	Rp (000)
										Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	20	20	118.725	20	20	131.960	20	154.337							60	405.022	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan	
		26	Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran	Jasa perkantoran (jasa persuratan) & peralatan kantor (ATK, Barang cetakan & bahan pustaka); alat kebersihan & bahan pembersih ;pembayaran upah tenaga jaga malam & kebersihan	bulan		12	12	30.712	12	12	38.152	12	84.501							36	153.365	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan	
		27	Penyediaan Jasa Keuangan	Honorarium petugas Penatausahaan keuangan, persediaan dan barang	bulan		12	12	26.015	12	12	27.263	12	23.364							36	76.642	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan	
		28	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi & Koordinasi	Rapat koordinasi & konsultasi, perjalanan dinas	bulan		12	12	61.998	12	12	66.545	12	46.472							36	175.015	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan	
		1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran	%										20	161.121	20	169.176	20	177.232	60	507.530			Sesudah perubahan	
		26	Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran	Jasa perkantoran (jasa persuratan) & peralatan kantor (ATK,Barang cetakan & bahan pustaka); alat kebersihan & bahan pembersih ;pembayaran upah tenaga kontrak	bulan										12	91.286	12	97.175	12	103.231	36	291.693	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
		27	Penyediaan Jasa Keuangan	Honorarium petugas Penatausahaan keuangan, persediaan dan barang	bulan										12	24.501	12	25.501	12	26.501	36	76.503	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	
		28	Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi & Koordinasi	Rapat koordinasi & konsultasi, perjalanan dinas	bulan										12	45.334	12	46.500	12	47.500	36	139.334	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Tahun Transisi (2017)			Tahun -1		Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan	
							Target	Realisasi	Rp (000)	2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (000)				
										Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target						Rp (000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		12	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan pengendalian & evaluasi kinerja	%	19	21,67	21,67	18.829	18,89	18,89	7.782	21,67	44.367							21,67	70.978	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan
		1	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja & Perubahan Rencana Kerja OPD	dokumen		3	3	16.448	2	2	2.451	3	38.435							8	57.334	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan
		2	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan Semesteran dan Tahunan	dokumen		2	2	1.020	2	2	1.923	2	2.195							6	5.138	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan
		3	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian & evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja, Penerapan SPIP OPD	dokumen		19	19	1.361	19	19	3.408	19	3.737							57	8.506	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan
		12	Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Kinerja	Cakupan perencanaan pengendalian & evaluasi kinerja	%										18,89	42.555	18,89	44.683	21,67	46.811	21,67	134.049	DLH		Sesudah perubahan
		1	Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja & Perubahan Rencana Kerja OPD	dokumen										2	29.114	2	30.683	2	31.211	6	91.008	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan
		2	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan keuangan Semesteran dan Tahunan	dokumen										2	5.750	2	6.000	2	7.000	6	18.750	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan
		3	Pengendalian, Evaluasi & Pelaporan Kinerja	Laporan pengendalian & evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, laporan tahunan, profil kinerja, Penerapan SPIP OPD	dokumen										19	7.691	19	8.000	19	8.600	57	24.291	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Tahun Awal (2016)	Tahun Transisi (2017)			Tahun -1			Tahun-2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5		Kondisi Akhir RPJM		penanggung Jawab	Lokasi	Keterangan					
							Target	Realisasi	Rp (000)	2018		2019		2020		2021		2022		Target	Rp (000)	Target				Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
										Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Realisasi	Rp (000)	Target	Realisasi	Rp (000)	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
		14	Program Peningkat-an Sarana /Prasa-rana Kerja & Kualitas SDM OPD	Cakupan peningkatan sarana/ prasarana kerja & kualitas SDM OPD	%	59,67	80,99	80,99	289.680	82,11	82,11	758.209	82,62	577.173							83,63	1.625.062	DLH		Sebelum perubahan					
		1	Pengadaan Sarana & Prasarana Perkantoran	Tersedianya Sarana prasarana perkantoran	unit		11	11	107.433	20	20	443.620	58	228.222							89	779.275	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan					
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya sarana prasarana kantor :Kendaraan roda dua, roda tiga,roda empat,Komputer, Laptop, Printer,AC, LCD	unit		8	8	176.247	30	30	284.589	88	328.951							126	789.787	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan					
				Terpeliharanya gedung kantor	unit		2	2		2	2		2								6	0			Sebelum perubahan					
				Pembayaran listrik, air & telepon	bulan		12	12		12	12		12								36	0			Sebelum perubahan					
		4	Pendidikan & Pelatihan Nonformal	Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik	orang		2	2	6.000	3	3	30.000	3	20.000							8	56.000	DLH	Kulon Progo	Sebelum perubahan					
		14	Program Peningkat-an Sarana /Prasa-rana Kerja & Kualitas	Cakupan peningkatan sarana/ prasarana kerja & kualitas SDM OPD	%										82,86	424.383	83,26	442.235	83,63	234.674	83,63	1.101.292			Sesudah perubahan					
		1	Pengadaan Sarana & Prasarana Perkantoran	Tersedianya Sarana prasarana perkantoran	unit										2	39.100	11	281.500	15	45.674	28	366.274	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan					
		2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Terpeliharanya sarana prasarana kantor :Kendaraan roda dua, roda tiga,roda empat,Komputer ,Laptop, Printer,AC, LCD Proyektor, soundsystem, dll.	unit										90	365.283	101	132.735	116	160.000	307	658.018	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan					
				Terpeliharanya gedung kantor	unit										2		2		2		6	0			Sesudah perubahan					
				Pembayaran listrik, air & telepon	bulan										12		12		12		36	0			Sesudah perubahan					
		4	Pendidikan & Pelatihan Nonformal	Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik	orang										4	20.000	4	28.000	4	29.000	12	77.000	DLH	Kulon Progo	Sesudah perubahan					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan target kinerja OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja OPD diuraikan pada tabel 18 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan oleh OPD pada tabel 19 :

Tabel 18

Indikator Kinerja OPD DLH Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi awal kinerja (2016)	Tahun transisi 2017		2018		2019	2020	2021	2022
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sebelum perubahan											
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,28	88,41	94,22	91,3	93,86	88,82	89,09	89,35	89,62
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	34	34,13	40	43	38	34,54	34,81	35,07	35,34
Sesudah Perubahan											
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks						94,28	95,24	95,45	95,65
2	Indeks Kualitas Air	Indeks						38	38	38	38

Tabel 19

Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD 2017 – 2022

No	Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal	Tar-get	Rea lisa si	Tar-get	Rea lisa si	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2016	2017 (Tahun transisi)	2018		2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sebelum Perubahan													
1	Program Pengelolaan & Konservasi Lingkungan Hidup	Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup(%)	%	46,79	47,38	48,97	51,40	57,19	56,34	58,82	60,03	61,25	61,25
2	Program Petaatan& Pengendalian Pencemaran	Cakupan peningkatan petaatandan pengendalian pencemaran (%)	%	58,93	63,82	73,13	63,92	88,74	88,91	89,57	90,24	90,91	90,91
Sesudah Perubahan													
1	Program Pengelolaan & Konservasi Lingkungan Hidup	Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup(%)	%	46,79					56,34	58,82	60,03	61,25	61,25
2	Program Petaatan& Pengendalian Pencemaran	Cakupan peningkatan petaatandan pengendalian pencemaran (%)	%	58,93					88,91	89,57	90,24	90,91	90,91

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 – 2022 disusun sebagai dokumen penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022. Dokumen ini disusun sebagai langkah percepatan pembangunan bidang lingkungan hidup. Perubahan Rencana Strategis merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan Renstra yang dilakukan pada pertengahan periode apabila terdapat perubahan sasaran, kegiatan, program atau adanya hal yang berdampak besar, penting, dan mendesak untuk dilakukan perubahan.

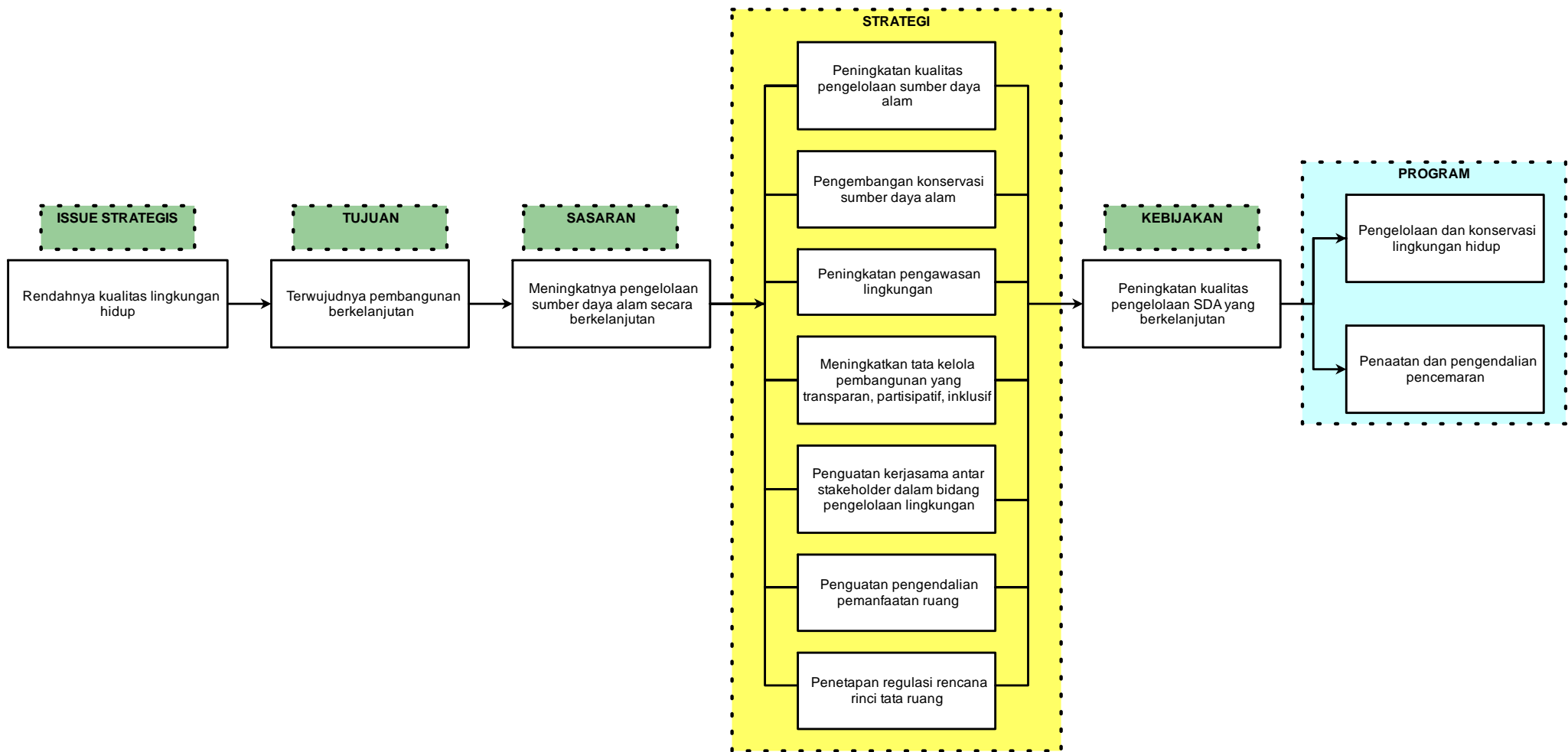
Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup periode 2017 – 2022 ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan program dan kegiatan untuk beberapa tahun ke depan. Akhir kata semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan mendatang.

Wates, 21 November 2019

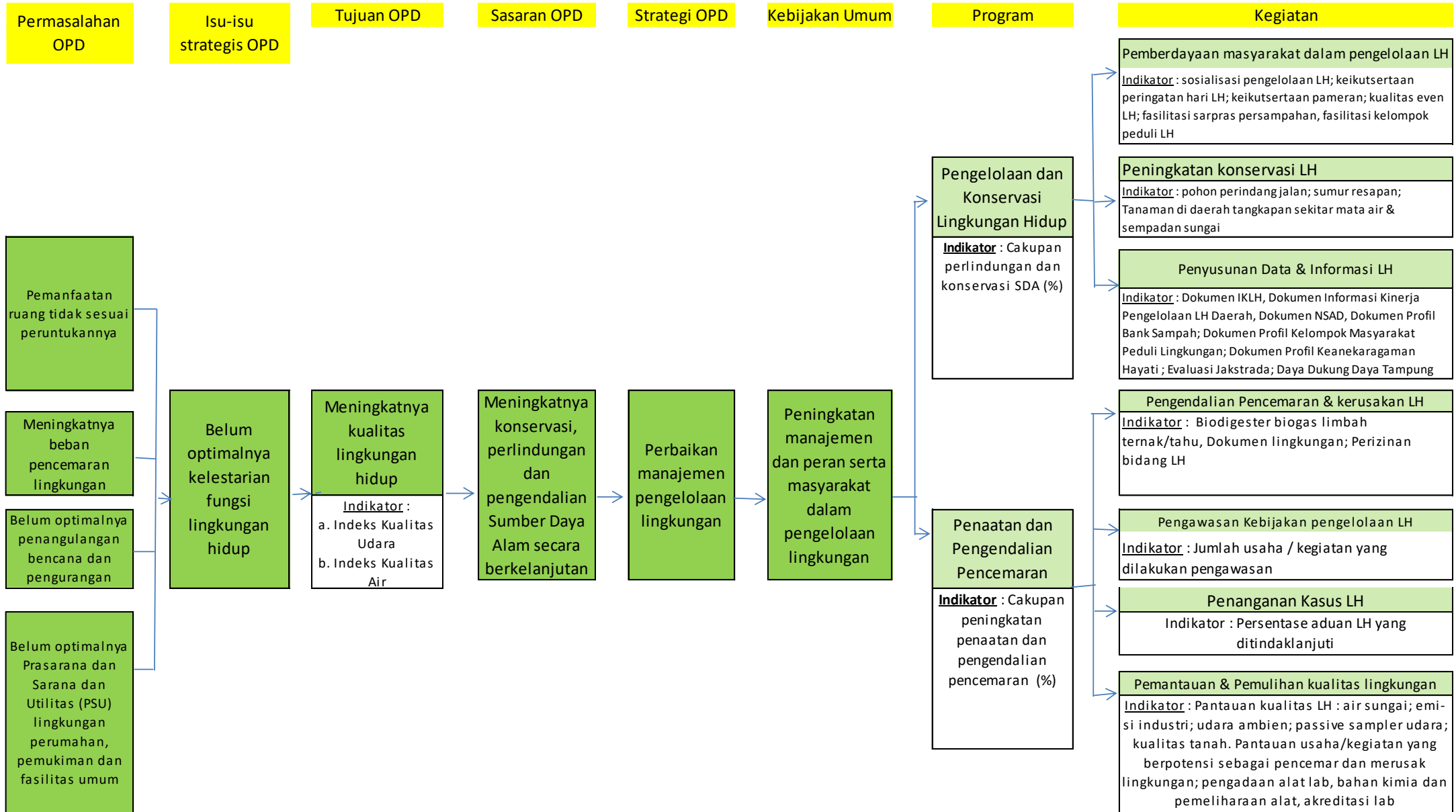
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo**

Arif Prastowo, S.Sos., M.Si
NIP. 19700514 199603 1 004

LAMPIRAN



BAGAN ALUR PEMIKIRAN OPD



METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM

No	Nama OPD	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Cara Perhitungan	Capaian Kinerja Program					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
						Realisasi	Realisasi	target	target	target	target
1	Dinas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan dan Konservasi lingkungan hidup	Cakupan pengelolaan dan konservasi lingkungan hidup	%	$((\text{Luas kawasan yang dikonservasi} / \text{luas kawasan yang seharusnya dikonservasi}) \times 100\%) + ((\text{Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup} / \text{jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang seharusnya dibentuk}) \times 100\%)$	48,97	57,19	56,34	58,82	60,03	61,25
					Luas kawasan yang dikonservasi	5,72	12	19,00	23,00	25,00	27,00
					Luas kawasan yang seharusnya dikonservasi	127,0	127,0	127,0	120,0	120,0	120,0
					Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup	114	128	128	129	130	131
					Jumlah lembaga peduli lingkungan hidup yang seharusnya dibentuk	122	122	131	131	131	131
		Program Penaatan dan Pengendalian Pencemaran	Cakupan peningkatan penataan dan pengendalian pencemaran	%	$((\text{Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sesuai SOP} / \text{jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk}) \times 100\%) + ((\text{jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan} / \text{jumlah titik pantau}) \times 100\%) + ((\text{jumlah usaha atau kegiatan yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan} / \text{jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi})) / 3$	73,13	88,74	88,91	89,57	90,24	90,91
					Persentase laporan atau pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti sesuai SOP	100	100	100	100	100	100
					Jumlah laporan atau pengaduan masyarakat yang masuk						
					Jumlah titik pantau yang memenuhi baku mutu atau baku kerusakan lingkungan	38	48	63	70	70	70
					Jumlah titik pantau	64	66	87	96	96	96
					Jumlah usaha atau kegiatan yang menindaklanjuti arahan dan atau teguran hasil pengawasan	30	43	47	48	49	50
					Jumlah usaha atau kegiatan yang memiliki ijin lingkungan yang diawasi	50	46	50	50	50	50

Tabel 20. Rencana Program Dana Alokasi Khusus

No.	Program	Tahun 2017 (Rp.000)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
			(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)
1	Penaatan dan Pengendalian Pencemaran	-	847.000	1.476.200	1.623.820	1.786.202	1.964.822,2
2	Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup	-	-	1.100.000	1.210.000	1.331.000	1.464.100

Tabel 21. Rencana Program Dana Keistimewaan DIY

No.	Program	Tahun 2017 (Rp.000)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
			(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)	(Rp.000)
1	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	-				400.000	400.000